

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM sebagai modal usaha mendukung perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pertumbuhan kredit kepada UMKM secara umum lebih tinggi dibandingkan total kredit umum perbankan.

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur UMKM yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada akhir Triwulan IV 2018 kredit UMKM mencapai Rp 1.086 triliun, tumbuh 9,7%. Pertumbuhan tersebut naik dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yaitu 9,1%. Peningkatan kredit Triwulan IV 2018 pada klasifikasi usaha kredit usaha menengah sebesar 7,51% serta usaha mikro dan kecil melambat masing sebesar 12,7% dan 10,4%. Perkembangan jumlah rekening kredit UMKM secara keseluruhan pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat 16,3 juta (Bank Indonesia, 2018).

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99% dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

Berdasarkan data di atas 16,3 juta dari 64,19 juta UMKM yang ada di Indonesia maka serapan penerimaan kredit yang diakses oleh UMKM hanya sekitar 25,39%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 75% UMKM belum memiliki akses pendanaan melalui penerimaan kredit. Pemerintah menerbitkan kebijakan pendanaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Pemerintah menetapkan target KUR yang disalurkan tahun 2020 sebesar Rp 190 triliun dengan suku bunga yang dibebankan kepada debitur sebesar 6% efektif per tahun. Berdasarkan Permenko No. 8 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, salah satu tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan dalam menyerap tenaga kerja.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 salah satu syarat dalam pengajuan kredit adalah perlu adanya laporan keuangan, hal ini menjadi syarat umum bagi lembaga kredit untuk memberikan bantuan kredit kepada debitur.

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1, menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Laporan keuangan disusun dengan berbagai prosedur yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Jika suatu kegiatan operasional perusahaan semakin banyak dan rumit maka semakin penting untuk diterapkan penyusunan laporan keuangan. Kondisi keuangan dari suatu usaha dapat ditunjukkan oleh hasil penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian serta ketrampilan dalam hal menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan (Rawun dan Tumilaar, 2019).

Menurut Kurniawanyah (2016), UMKM mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Adapun kesulitan yang dihadapi antara lain adalah pengetahuan pembukuan akuntansi yang terbatas, proses akuntansi yang rumit, dan anggapan kurang pentingnya laporan keuangan oleh UMKM. Selain itu, latar belakang pendidikan

yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku, pelaksanaan pembukuan akuntansi yang kurang disiplin dan rajin, keterbatasan panduan proses akuntansi yang mudah dipahami, pelatihan dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah yang minim serta keterbatasan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Selain itu, SAK EMKM dapat dijadikan salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) kepada UMKM bukanlah hal yang mudah. UMKM sebagai pelaku bisnis membutuhkan waktu dan sumber daya dalam mengimplementasikan standar tersebut. Sebagian besar UMKM masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membuat pembukuan. Padahal pembukuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sangat penting selain agar bisa mengetahui tingkat kekayaan perusahaan, tingkat kegiatan operasionalnya, pembukuan ini juga digunakan sebagai dasar pengajuan pendanaan ke perbankan

guna pengembangan kegiatan bisnisnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pembukuan agar tingkat akuntabilitas dan transparansi UMKM menjadi meningkat.

Menurut Rahmawati dan Puspasari (2017) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM diantaranya ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan serta jenjang pendidikan terakhir dari pemilik. Selain itu, hal tersebut dan profesionalisme manajemen juga berpengaruh secara positif terhadap tingkat pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP. Dampak dari pemahaman implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap besarnya kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM.

Sedangkan, menurut penelitian Mubiroh dan Ruscitasari (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan latar belakang pendidikan responden secara signifikan tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Dalam penelitian ini perusahaan responden mayoritas berskala mikro. Lulusan SMA/SMK dengan jurusan bukan akuntansi mendominasi variabel latar belakang pendidikan responden sehingga mereka tidak tahu sama sekali tentang SAK EMKM. Dengan demikian, perlu dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi dalam penelitian ini supaya pelaku UMKM mampu memahami dan mampu menyusun laporan keuangan secara akuntansi. Apabila responden mampu memahami dan mengimplementasikan SAK EMKM dengan baik, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Namun, variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan kredit UMKM secara

signifikan. Kualitas laporan keuangan yang masih rendah tidak menghalangi pelaku UMKM dalam memperoleh kredit dari perbankan maupun keuangan lembaga lainnya.

Pada penelitian yang ditulis oleh Prajanto dan Septriana (2018) memperoleh hasil bahwa latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, ukuran usaha dan lama berdirinya perusahaan tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha dalam melakukan pembukuan dan cenderung berpengaruh negatif. Hal ini karena para pelaku UMKM cenderung ingin memperluas bisnis dan berupaya untuk tetap menjalankan usaha daripada melakukan pembukuan yang baik dan benar. Besaran pencairan kredit yang diberikan oleh perbankan juga cenderung tidak dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Hal ini sapat dilihat pada hasil pengujian yang menunjukkan pengaruh negatif. Besaran kredit yang diberikan oleh perbankan cenderung dipengaruhi oleh besaran jaminan dan skala bisnis.

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota favorit di Jawa Tengah. Daya tarik Kota Semarang cenderung menimbulkan arus urbanisasi seiring dengan berkembangnya lapangan usaha dan sektor industri. Sektor UMKM yang bergerak dalam berbagai lapangan usaha khususnya kuliner di Kota Semarang mempunyai potensi dan prospek yang baik untuk dikembangkan. UMKM di Kota Semarang mengalami gejolak yang dikhawatirkan mampu mematikan perekonomian Kota Semarang. Terlebih jika UMKM sudah tidak mampu lagi menjalankan operasional usahanya dikarenakan tidak mendapatkan akses pendanaan untuk mempertahankan laju roda usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian oleh Murti et al. (2018) yang membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan SME menjadi pertimbangan pihak luar dalam mengambil keputusan, dan terbukti dengan pengaruh kualitas laporan keuangan pada jumlah kredit yang diterima oleh UKM. Informasi atau sosialisasi, latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman pengusaha tentang SAK ETAP. Sehingga, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM terhadap Penerimaan Kredit (Studi Kasus pada UMKM Kota Semarang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Namun, UMKM di Indonesia terkendala oleh belum mampunya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas berbasis SAK EMKM, sehingga dalam penyaluran kredit dari perbankan belum sepenuhnya bisa terealisasi. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap penerimaan kredit UMKM Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris:

1. Untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap penerimaan kredit UMKM Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi entitas mikro mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerimaan kredit UMKM serta referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi UMKM dalam menerapkan SAK EMKM sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, informatif dan akuntabel yang dapat digunakan untuk mengakses pendanaan sebagai upaya menjaga kelangsungan aktivitas operasional UMKM tetap berjalan dengan baik khususnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan khususnya terkait pelaporan keuangan UMKM.

